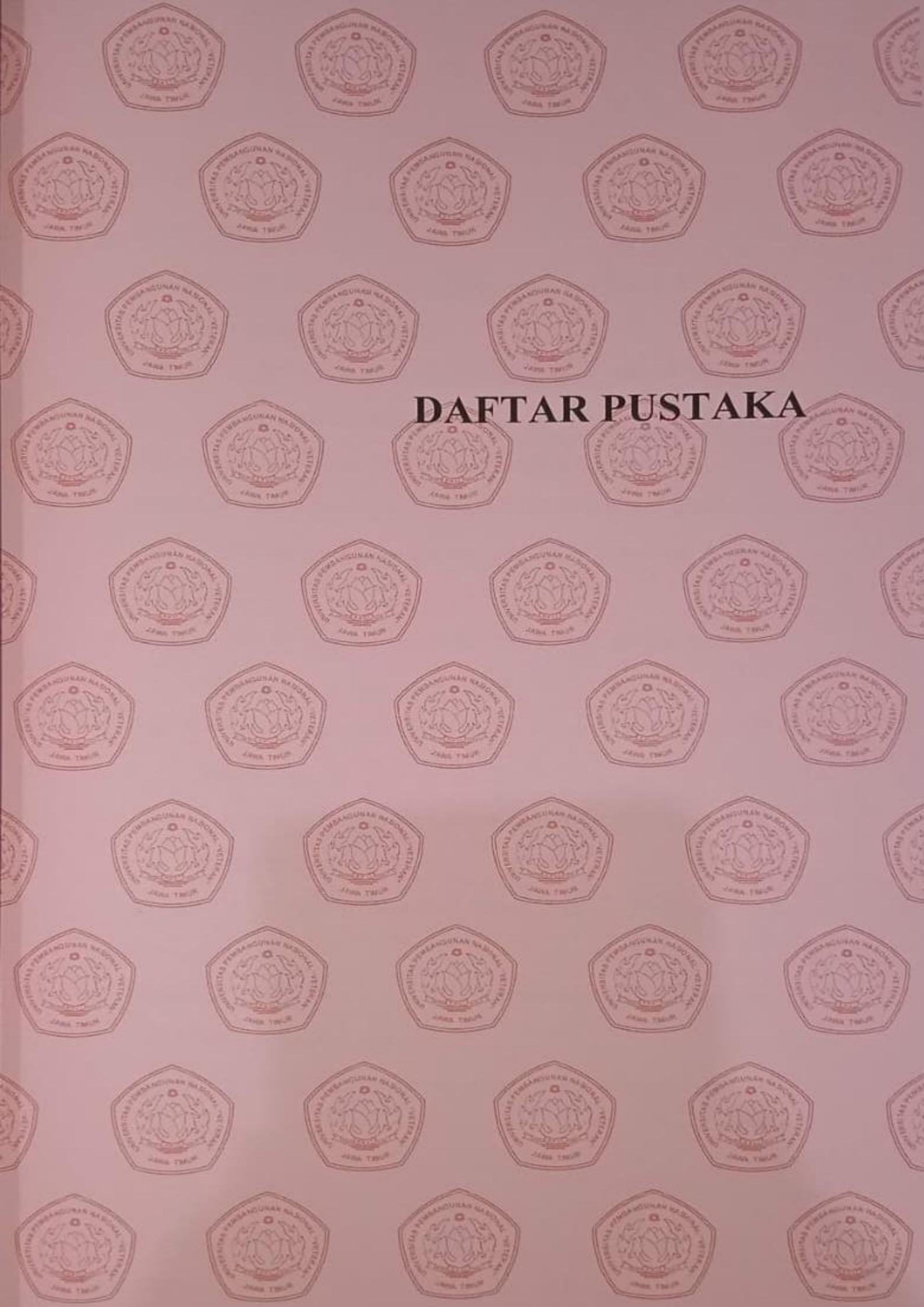




DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdurahman, F. (2011). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Achmad, A. (2021). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*. Jakarta : Kencana.
- Ayyub. (2004). *Fikh Keluarga*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
- Basrowi, S. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka
- Erma, F. (2020). *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini*. Yogyakarta : Pustaka Ilmu.
- Fadhallah, (2020). *Wawancara*. Jakarta : UNJ PRESS. Husein, M. (2001). *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta : LKIS.
- Joko, S. (2004). *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Khoirul, A. (2017). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta : Bening Pustaka.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Media Group.
- Mansyhuri. (2008). *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aplikatif)*. Jakarta : Revika Aditama.
- Soerjono, S. (2014). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.

B. PERATURAN UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3019)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perceraian. (Lembaran, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6401)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran, Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 109)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak (Lembaran, Tambahan Lembaran Negara
Tahun 1979 yang telah dicetak ulang)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang
Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019
tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

C. JURNAL

- Abdul Mustaqim. (2015). Berbagai Penyebutan Anak dalam Al-Qur'an Implikasi dan Makananya Dalam Konteks Qur'anic Parenting. Jurnal: Lecture Keagamaan, 272.
- Affan, Sunarto. (2026). Ketidakefektifan Pencegahan Pernikahan Dini di Indoneisia : Analisis Sistem Hukum Lawrence M. Fridman. Unsrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 838-858.
- Ariani, N. (2021). Implementasi Batas Usia Perkawinan Pasca Perubahan UU Perkawinan. Jurnal Hukum Keluarga Indonesia, Vol. 5, No. 2, 145–162.
- Fauzi, Ahmad. (2020). Peran KUA dalam Pencegahan Perkawinan Anak. Jurnal Al-Syakhshiyah, Vol. 12, No. 1, 56–74.
- Hidayat, R. (2021). Analisis Putusan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama dan Dampaknya terhadap Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 8, No. 3, 377–396.
- Irma, S. (2020). Administrasi Kependudukan dan Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan Usia Dini, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 5, No 2, 118.
- Khisni. (2011). Peradilan Agama Sebagai Peradilan Keluarga Serta Perkembangan Studi Hukum di Indonesia. Jurnal Hukum, Vol XXV, No 1, 490.

Nurhayati, S. (2020). Faktor Sosial Budaya dalam Praktik Perkawinan

Anak di Pedesaan. *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 7, No. 1, 22–38.

Moh. Hatta. (2016). Batasan Usia Perkawinan Dalam Perspektif Ulama

Klasik dan Kontemporer. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 66.

Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan

Dampaknya Bagi Pelaku. *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 385-441.

Sutisna, A. (2020). Batas Usia Perkawinan dan Politik Hukum

Perlindungan Anak. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 1, 89–104.

D. INTERNET

Erni Herawati, Status Anak Menurut Hukum, [https://business-](https://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-anak-menurut-hukum/)

[law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-anak-menurut-hukum/](https://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-anak-menurut-hukum/), Mei

2018, dikutip pada 7 November 2023.

E. WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Drs. Aliyanto selaku Kepala Kantor Urusan

Agama (KUA) Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan pada 29

September 2023 Pukul 13.00 WIB.